

BAB II

GEN Z DAN POLITIK DI INDONESIA

2.1 Generasi Z dalam Partisipasi Politik Indonesia

Generasi Z tumbuh dan berkembang pada masa ketika teknologi digital, internet, dan media sosial mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kondisi tersebut menjadikan mereka lekat dengan sebutan *digital native*, yakni kelompok yang telah terbiasa memanfaatkan perangkat dan platform digital dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari mencari informasi, menjalin komunikasi, hingga mengekspresikan pendapat. Kemajuan teknologi ini pada gilirannya turut mengubah pola interaksi generasi muda terhadap dinamika politik dan kehidupan berdemokrasi. Jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, Generasi Z cenderung lebih mengandalkan platform digital sebagai sumber informasi karena menawarkan kecepatan, sifat interaktif, serta kemudahan dalam mengaksesnya (Wumbu et al., 2025).

Dalam konteks politik, Generasi Z menjadi kelompok yang semakin penting karena memiliki tingkat keterhubungan yang tinggi dengan media sosial. Kehadiran media sosial memungkinkan generasi muda untuk memperoleh informasi politik secara cepat, mengikuti perkembangan isu publik, serta berpartisipasi dalam berbagai bentuk komunikasi politik. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan membangun keterlibatan terhadap berbagai isu politik (Wumbu et al., 2025).

Perubahan budaya komunikasi politik tersebut turut memengaruhi bentuk partisipasi politik Generasi Z. Jika partisipasi politik pada masa sebelumnya lebih banyak diwujudkan melalui aktivitas konvensional seperti mengikuti organisasi politik atau menghadiri kegiatan politik secara langsung, Generasi Z cenderung menunjukkan keterlibatan politik melalui aktivitas digital. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa mengikuti informasi politik di media sosial, memberikan tanggapan terhadap isu publik, membagikan informasi politik, hingga terlibat dalam diskusi politik secara daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang partisipasi politik bagi generasi muda (Estyani Cahya & Nasiwan, 2024).

Penelitian Natalia, Sasmita, dan Ahmad (2025) menjelaskan bahwa media sosial berperan sebagai saluran informasi, komunikasi politik, dan ruang diskusi bagi Generasi Z. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi media yang banyak digunakan untuk

memperoleh informasi politik, membentuk opini, serta meningkatkan kesadaran politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang semakin besar dalam membentuk orientasi politik generasi muda di era digital (Natalia et al., 2025).

Selain meningkatkan akses terhadap informasi politik, media sosial juga membuka peluang yang lebih luas bagi Generasi Z untuk terlibat dalam kehidupan demokrasi. Literatur mengenai kewargaan digital menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena penting bagi Generasi Z untuk menyampaikan aspirasi, mengekspresikan pandangan terhadap kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam berbagai isu sosial dan politik. Dengan demikian, partisipasi politik Generasi Z saat ini tidak hanya terjadi dalam ruang politik formal, tetapi juga berlangsung secara aktif melalui berbagai aktivitas digital yang difasilitasi oleh media sosial (Ramdani et al., 2026).

2.2 Hoaks Politik di Media Sosial Indonesia

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi politik. Jika pada masa sebelumnya informasi politik lebih banyak disalurkan melalui media massa konvensional yang memiliki mekanisme penyuntingan dan verifikasi, saat ini setiap pengguna media sosial dapat menjadi produsen sekaligus penyebar informasi. Kondisi tersebut menciptakan arus informasi yang sangat cepat, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang yang lebih besar bagi penyebaran misinformasi, disinformasi, dan hoaks politik. Media sosial memungkinkan informasi menyebar secara luas dalam waktu singkat tanpa melalui proses pemeriksaan fakta yang memadai, sehingga masyarakat berpotensi menerima informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan (Idris, 2025).

Hoaks politik merupakan informasi palsu atau menyesatkan yang berkaitan dengan aktor politik, kebijakan publik, proses pemilu, maupun isu-isu politik lainnya yang disebar untuk memengaruhi persepsi dan opini masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik digital, hoaks tidak hanya berfungsi sebagai informasi yang salah, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen propaganda yang dirancang untuk membangun citra tertentu, menyerang lawan politik, atau memobilisasi dukungan publik. Penelitian Yanti et al. (2025) mengenai penyebaran hoaks pada Pemilu Presiden 2024 menunjukkan bahwa hoaks politik di media sosial sering kali disusun menggunakan pendekatan emosional, simbolik, dan memanfaatkan algoritma platform digital untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Fenomena hoaks politik menjadi semakin menonjol menjelang penyelenggaraan pemilu. Data yang dihimpun oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terdapat 2.330 hoaks yang teridentifikasi di Indonesia dan sebanyak

1.292 di antaranya merupakan hoaks politik. Dari jumlah tersebut, 645 hoaks secara khusus berkaitan dengan Pemilu 2024 (mediaindonesia, 2024). Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode Pemilu 2019 dan menandakan bahwa isu politik menjadi salah satu tema yang paling dominan dalam penyebaran hoaks di ruang digital Indonesia.

Tingginya penyebaran hoaks politik tidak terlepas dari karakteristik media sosial yang memungkinkan terjadinya replikasi informasi secara cepat antarplatform. Penelitian Kurniyawan dkk. menemukan bahwa penyebaran hoaks di media sosial umumnya berlangsung melalui pola penyebaran eksponensial, reproduksi lintas platform, serta penggunaan kembali informasi yang sebenarnya benar tetapi ditempatkan dalam konteks yang berbeda sehingga menghasilkan makna yang menyesatkan (Kurniyawan et al., 2026). Karakteristik tersebut menyebabkan masyarakat sering kali kesulitan membedakan informasi yang faktual dengan informasi yang telah dimanipulasi.

Bagi Generasi Z yang menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi, paparan terhadap hoaks politik menjadi tantangan yang penting untuk diperhatikan. Penelitian mengenai pemilih pemula pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Generasi Z sangat bergantung pada platform digital seperti TikTok dan Instagram dalam memperoleh informasi politik. Namun, tingginya ketergantungan tersebut juga diiringi dengan risiko terpapar disinformasi dan efek *filter bubble* yang dapat memengaruhi cara mereka memahami isu politik (Yusrin & Salpina, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berperan sebagai sarana memperoleh informasi politik, tetapi juga menjadi ruang yang memungkinkan penyebaran informasi yang menyesatkan dan berpotensi memengaruhi minat serta orientasi politik generasi muda.

2.3 Penggunaan Media Sosial sebagai Ruang Politik Generasi Z

Pesatnya kemajuan teknologi digital membuat media sosial berkembang menjadi salah satu ruang paling penting bagi Generasi Z dalam mencari informasi, berinteraksi, serta membangun pandangan terhadap beragam isu yang berkembang di masyarakat. Berbeda dari media massa konvensional yang cenderung bersifat komunikasi satu arah, media sosial memberi ruang bagi penggunanya untuk sekaligus berperan sebagai penerima maupun penyebar informasi. Karakteristik semacam ini menjadikan media sosial bukan sekadar alat komunikasi, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik digital yang membuka peluang bagi pertukaran gagasan, diskusi, serta keterlibatan masyarakat dalam persoalan sosial maupun politik. Bagi Generasi Z yang besar dalam lingkungan digital, media sosial menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian mereka, termasuk dalam mengikuti informasi politik dan perkembangan isu-isu public (Wumbu et al., 2025).

Dalam ranah politik, media sosial telah bertransformasi menjadi kanal utama yang digunakan Generasi Z untuk memperoleh informasi terkait kebijakan pemerintah, pemilihan umum, partai politik, serta tokoh-tokoh politik. Penelitian Natalia et al. (2025) mengungkapkan bahwa media sosial berfungsi ganda, yakni sebagai saluran informasi politik, sarana komunikasi politik, sekaligus ruang berdiskusi bagi kalangan muda. Platform semacam Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi pilihan utama untuk mengakses informasi politik, membentuk opini publik, sekaligus menumbuhkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Kemudahan yang ditawarkan media sosial memungkinkan penyebaran informasi politik berlangsung lebih cepat dan menjangkau khalayak yang lebih luas dibandingkan dengan media konvensional.

Selain berperan sebagai sumber informasi, media sosial juga berfungsi sebagai ruang interaksi politik yang membuka peluang bagi Generasi Z untuk terlibat aktif dalam berbagai bentuk aktivitas politik secara digital. Melalui fitur seperti kolom komentar, unggahan konten, siaran langsung, maupun forum diskusi daring, generasi muda dapat menyuarakan pandangan politiknya, memberi tanggapan atas kebijakan publik, serta ikut ambil bagian dalam perbincangan politik yang melibatkan khalayak luas. Riset yang dilakukan Wumbu et al (2025) mengungkap bahwa media sosial berperan dalam mendorong partisipasi politik digital Generasi Z, misalnya melalui aktivitas memberi tanggapan pada konten politik, menyebarluaskan informasi, hingga ikut serta dalam dialog publik secara online. Hal ini memperlihatkan bahwa media sosial telah menciptakan ruang partisipasi baru yang jauh lebih mudah dijangkau oleh generasi muda dibandingkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang konvensional.

Kontribusi media sosial dalam mendorong partisipasi politik Generasi Z juga tampak nyata pada berbagai peristiwa politik penting, seperti Pemilu maupun Pilkada. Ramadhani et al., (2025) memaparkan bahwa media sosial tidak sekadar berperan sebagai sumber informasi politik utama bagi Generasi Z, melainkan juga menjelma menjadi ruang diskusi, ajang kampanye, sekaligus sarana mobilisasi politik. Konten yang dikemas secara interaktif, penggunaan gaya bahasa yang akrab bagi kalangan muda, serta peran para *influencer* turut membuat informasi politik menjadi lebih mudah dicerna oleh pemilih muda. Melalui hal tersebut, media sosial berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran politik sekaligus mendorong keterlibatan Generasi Z dalam proses demokrasi.

Kendati demikian, pemanfaatan media sosial sebagai ruang berpolitik juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Kemudahan dalam menyebarkan informasi turut membuka celah beredarnya hoaks, disinformasi, maupun kampanye hitam yang berpotensi memengaruhi cara pandang politik penggunanya. Di samping itu, mekanisme algoritma pada media sosial juga berisiko memunculkan fenomena *echo chamber*, yaitu keadaan di mana pengguna cenderung lebih sering terpapar informasi yang sejalan dengan pandangan yang sudah mereka yakini sebelumnya. Kondisi semacam ini dapat menyempitkan keragaman informasi yang diterima serta berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik di tengah masyarakat. Karena itu, meskipun media sosial memegang peranan penting dalam memperluas akses informasi sekaligus mendorong partisipasi politik Generasi Z, pemanfaatannya tetap perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital agar informasi yang diterima dapat dicermati dan dinilai secara kritis (Ramadhani et al., 2025).